



**ANALISIS PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
DI DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023**

**SKRPSI**

Oleh :

**Marwa Roika Indriani**

NPM. 202014060

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**



**ANALISIS PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
DI DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023**

**SKRPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
Menyelesaikan program studi Administrasi Publik (S-1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S. Ap)

Oleh :

**Marwa Roika Indriani**  
NPM. 202014060

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**

## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai  
Dana Desa Di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan  
Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Nama Mahasiswa : Marwa Roika Indriani

NPM : 202014060

Program Studi : Administrasi Publik

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Situbondo, Mei 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si  
NIDN. 0714067503

Dr. Vita Novianti, SP, M.AP  
NIDN. 0718037801

Mengetahui,

Kepala Program Studi Administrasi Publik

Muh. Hamdi Zain, S.Sos, M.AP  
NIDN. 0719068005

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwa Roika Indriani

NPM : 202014060

Alamat : Kp. Karang Sari, Kilensari RT02 TW01,  
Kabupaten Situbondo

No. Telepon (HP) : 089527237010

Menyatakan bahwa rencana penelitian yang berjudul “**Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Kilensari Panarukan**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (Plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggung jawaban atau etika akademik yang dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 08 Agustus 2024

Yang menyatakan

Marwa Roika Indriani  
NPM. 202014060

## **PENGESAHAN**

Diterima oleh penitia penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Abdurachaman Saleh Situbondo

## **SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Dipertahankan dihadapan panitia penguji

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Agustus

Tahun : 2024

## **PANITIA PENGUJI**

Ketua

Anggota

Anggota

Dini Noor Aini S.Sos. M,Si  
NIDN. 0714067503

Dr. Vita Novianti, SP, M.AP  
NIDN. 0718037801

Drs. Eddy Basuki M,Si  
NIDN. 0728046201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si  
NIDN. 0702047907

**PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Marwa Roika Indriani  
NPM : 202014060  
Alamat : Kp Karang Sari Desa Kilensari RT 02 RW01  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmuapannya saya yang berjudul: "**Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Kilensari Panarukan**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Situbondo, 08 Agustus 2024

Yang menyatakan

Marwa Roika Indriani  
NPM. 202014060

## **PERSEMBAHAN**

Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, serta sholawat dan salam kuhaturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setulus hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang teristimewa Bapak Khairul Anwar dan Ibu Erlin Ernawati Terima kasih atas lantunan doa, motivasi, keikhlasan, pengorbanan, kesabaran, dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan kuliah. Terima kasih juga karena telah menjadi orang tua sekaligus sahabat terbaik.
2. Kepada keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan doa darimu yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
3. Almamater Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang saya banggakan.

## **PRAKATA**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Blimbing Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo" dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Bapak Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Vita Novianti, SP, M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga kependidikan beserta jajarannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

## **Moto**

"Tangan yang membantu adalah tangan yang diberkati."

( Organisasi Amal Muhammadiyah)

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih belum terselesaikan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan melalui kebijakan atau program, salah satunya program Bantuan Langsung Tunai Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program BLT DD, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tahap persiapan, melibatkan koordinasi dari berbagai pihak dengan membentuk rapat Musyawarah Desa. Tahap penetapan penerimaan KPM, melibatkan pendataan, verifikasi, dan validasi. Tahap mekanisme penyaluran, melibatkan penetapan perencanaan penggunaan Dana Desa, persetujuan alokasi anggaran, identifikasi penerima manfaat, pemberitahuan, pencairan tunai, dan pemantauan evaluasi, dan Tahap monitoring dan evaluasi. Faktor pendukung pelaksanaan program BLT DD adalah sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang memadai serta terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak yang berkesinambungan. Selain itu, juga terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program BLT DD yaitu minimnya pengetahuan masyarakat, dan terdapat masyarakat yang tidak memiliki KTP.

**Kata Kunci :** Kedisiplinan, Loyalitas Kerja, Kinerja Pegawai.

## **ABSTRACT**

*Poverty is a social problem that has yet to be resolved in several countries, including Indonesia. The government continues to make improvements through policies or programs, including the Village Fund Direct Cash Assistance (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) program. This study aims to determine the implementation of the BLT DD program and analyze the supporting and inhibiting factors in implementing the Village Fund Direct Cash Assistance program in Kilensari Village, Panarukan District, Situbondo Regency. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The data collection techniques are observation, interview, and documentation methods. The study results show that the preparation stage involves coordination from various parties by forming a Village Deliberation meeting. Determining KPM acceptance involves data collection, verification, and validation. The distribution mechanism stage involves determining the planning of Village Funds, approval of budget allocations, identification of beneficiaries, notification, cash disbursement, and monitoring and evaluation stages. Supporting factors in implementing the BLT DD program are adequate human resources, finances, infrastructure, and sustainable cooperation between parties. In addition, there are several inhibiting factors in implementing the BLT DD program, namely the need for more public knowledge and the fact that some people do not have ID cards.*

*Keywords: discipline, employee performance, work loyalty*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISISNALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2 Kebijakan Publik .....</b>	<b>9</b>
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	11
2.2.2 Tahap Kebijakan Publik .....	12
2.2.3 Pelaksanaan Kebijakan Publik .....	15
2.2.4 Elemen Kebijakan .....	17
<b>2.3 Program Bantuan Langsung Tunai .....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa .....	17

2.3.2 Karakteristik Calon Penerima BLT .....	20
<b>2.4 Konsep Kemiskinan .....</b>	<b>21</b>
2.4.1 Pengertian Kemiskinan .....	21
2.4.2 Penyebab Terjadinya Kemiskinan .....	25
2.4.2 Dampak Kemiskinan .....	27
<b>2.5 Konsep Program .....</b>	<b>28</b>
<b>2.7 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>29</b>
<b>2.8 Kerangka Berpikir .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>35</b>
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	35
3.2.2 Waktu Penelitian .....	35
<b>3.3 Sumber Data dan Jenis Data .....</b>	<b>36</b>
3.3.1 Sumber Data .....	36
3.3.2 Jenis Data .....	36
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>37</b>
<b>3.5 Penentuan Informan .....</b>	<b>38</b>
<b>3.6 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>40</b>
<b>3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>43</b>
4.1.1 Deskripsi Lokasi .....	44
4.1.2 Demografi Desa Kilensari .....	44
4.1.3 Ekonomi Desa Kilensari .....	45
4.1.4 Rincian Dana Desa Kilensari .....	46
4.1.2 Struktur Organisasi .....	47
4.1.3 Sarana Dan Prasarana Desa Kilensari.....	49
4.1.4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa .....	49
<b>4.2 Hasil Penelitian .....</b>	<b>51</b>
4.2.1 Persiapan .....	51

4.2.2 Mekanisme Pendataan/Penyiapan Data KPM .....	52
4.2.3 Mekanisme Penyaluran BLT DD .....	55
4.2.4 Monitoring dan Evaluasi .....	58
4.2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan.....	60
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>63</b>
4.3.1 Mekanisme Pendataan/Penyiapan Data KPM .....	63
4.3.2 Mekanisme Penyaluran BLT DD .....	64
4.3.3 Monitoring dan Evaluasi.....	65
4.3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan.....	66
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis .....	45
Tabel 4.2 Profesi Yang Ada Di Desa Kilensari .....	46
Tabel 4.3 Penyaluran Dana Desa Kilensari.....	47
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Di Desa Kilensari.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo, tahun 2015 -2022 .....	2
Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan menurut William Dunn .....	14
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	41
Gambar 3.2 Triangulasi Sugiyono .....	42
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Situbondo .....	43
Gambar 4.2 Diagram Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo, Maret 2014-2024.....	45
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa Kilensari .....	48

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di setiap negara berbeda-beda, terutama dari bidang sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dan tak terhitung jumlahnya, sedangkan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia tergolong tinggi namun masih berkualitas rendah. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara berkembang dengan tingkat penduduk yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terbilang rendah dan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih belum terselesaikan di beberapa negara. Terutama di negara berkembang khususnya di Indonesia. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal, dari standar hidup yang telah ditentukan. Menurut Solikaturun, Yulia Masruroh, dan Ahmad Zuber (2014) dalam penelitian mereka yang berjudul "Kemiskinan dalam Pembangunan" menyatakan bahwasanya kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya suatu negara.

Pembangunan merupakan suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu negara demi terciptanya kehidupan sejahtera. Proses untuk meningkatkan kualitas hidup, difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Dimana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan masyarakat.

Beberapa kondisi yang mendiskripsikan masyarakat miskin seperti masih banyaknya tingkat pengangguran, lingkungan yang buruk dan masyarakat yang masih kekurangan gizi, terutama anak-anak. Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antara daerah dan golongan masyarakat, akibat tidak meratanya distribusi pendapatan dan kurangnya lapangan

pekerjaan. Sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar.

Setiap fenomena memiliki beberapa faktor seperti halnya dengan kemiskinan. Menurut Margaretha, Larasati Prayoga, Muchtolifah Sishadiyanti (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Todaro & Staphen C (2014) menjelaskan upah minimum dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan. Standar hidup masyarakat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan bakat.

Ambok Pangiuk (2018) menjelaskan dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi akan terwujud kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran dan berdampak langsung pada tingginya kemiskinan (O'Campo et al., 2015).

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	254 656	91 170	13,63
2016	270 406	89 680	13,34
2017	276 924	88 230	13,05
2018	294 209	80 270	11,82
2019	305 280	76 440	11,20
2020	322 527	83 740	12,22
2021	336 040	86 950	12,63
2022	356 133	81 460	11,78

Gambar 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo, tahun 2015 -2022

Gambar 1.1 menunjukkan terjadinya penambahan tingkat kemiskinan dari tahun 2015 hingga 2022, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sempat menurun dari 80,270 menjadi 76,440, akan tetapi naik kembali menjadi 83,740 gambar tersebut menjelaskan bahwasanya tingkat kemiskinan semakin bertambah seiring tahun berganti, penyebab utama kemiskinan semakin bertambah iyalah dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dari segi ekonomi. Dikerenakan adanya pembatasan seluruh kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi. Oleh karena itu banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga tingkat kemiskinan menjadi lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Banyak kegiatan perekonomian yang tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga dalam situasi tersebut mengurangi kemampuan rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung Covid-19. Kenaikan harga barang pada masyarakat juga berdampak dalam kehidupan masyarakat sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga dengan penghasilan rendah.

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan secara nasional, untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah, pembangunan kota dan desa. Dengan itu pemerintah mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan program bantuan pendidikan. Didalam program keluarga harapan terdapat bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT). Namun sumbernya berbeda dengan program harapan keluarga. Jika program keluarga harapan (PKH) bersumber dari APBN sedangkan bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa.

Bantuan langsung tunai atau yang biasa kita dengar dengan BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau bantuan lainnya. Tujuan utama bantuan langsung tunai adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Bantuan langsung tunai (BLT) adalah suatu program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang khusus diberikan

kepada masyarakat miskin. Besaran dana bantuan langsung tunai dan mekanisme penyalurannya tergantung kepada kebijakan setiap negara penyelenggara. Istilah bantuan langsung tunai pertama kali dikenalkan di Brazil dan diadopsi oleh negara lain. Indonesia pertama kali melaksanakan bantuan langsung tunai pada tahun 2005 dilanjutkan pada tahun 2009 dan 2013. Istilah BLT diganti dengan BLSM (Bantuan langsung Sementara Masyarakat).

(Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan\\_langsung\\_tunai](https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai)Tanggal )

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan mewujudkan Desa tanpa Kemiskinan melalui BLT Dana Desa. Calon penerima paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan, tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial lainnya.

Salah satu Desa yang ikut melaksanakan program tersebut adalah Desa Kilensari. Desa Kilensari merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Situbondo Kecamatan Panarukan yang masyarakatnya masih memiliki pendapatan yang rendah, atau tergolong tidak mampu. Masyarakat Desa Kilensari memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Mulai dari nelayan, petani, pedagang, kuli, buruh, pengrajin, peternak dan pekerja serabutan. Pendapatan yang di peroleh belum tentu pasti, dan dapat dibilang kurang mencukupi. Terutama pada masa Covid-19, yang mana aktifitas yang biasanya berjalan normal terhambat dengan masa Pembatasan soisal bersekala besar atau yang biasa kita dengar PSBB.

Terbatasnya kegiatan mengakibatkan banyaknya kegiatan terhenti, banyaknya perahu nelayan yang tidak berlayar karena harga solar yang naik di tengah pandemi, tak hanya harga BBM yang naik pada masa pandemi, melainkan harga pupuk, dan bahan pokok juga mengalami kenaikan. Banyaknya masyarakat Desa kilensari yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PK) dari pekerjaannya. Banyaknya para pedagang yang mengeluh karena omset yang di peroleh menurun

derastis, karena banyaknya masyarakat yang takut untuk mengunjungi tempat umum, sehingga kegiatan ekonomi menjadi terhambat.

(Sumber : BKKBN Kilensari BERSERI )

Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo memiliki Delapan Dusun. Dusun Karang Sari, Dusun Kilen Selatan, Dusun Bataan, Dusun Somangkaan, Dusun Tanah Anyar, Dusun Pesisir Selatan, Dusun Pesisir Tengah, Dusun Pesisir Utara. Penduduk Desa Kilensari sejumlah 14.785 Jiwa dengan mayoritas adalah suku Madura. Ketentuan dan persyaratan berlangsungnya bantuan langsung tunai dilaksana berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Tentang besaran penerima bantuan langsung tunai ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat. Pembayaran bantuan langsung tunai dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

Tujuan program bantuan langsung tunai untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Sejauh ini, pencairan dana Bantuan Langsung Tunai Dana desa (BLT DD) sudah diberikan pemerintah Desa Kilensari Kepada masyarakat, namun saja terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Dana Bantaun Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sudah diberikan pemerintah Desa kepada masyarakat yang mendapatkan. Pemberian Bantuan Langsung Tunai di satu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik. Seperti halnya kecemburuan dan disharmoni antar masyarakat, serta sifatnya konflik vertikal kerana sebagian masyarakat akan menuduh pemerintah tidak adil dan tidak benar dalam menyalurkan dana bantaun tersebut. Bantuan Langsung Tunai juga dapat menimbulkan konflik di tingkat keluarga. Selain dampak terhadap timbulnya konflik, dampak lainnya adalah pemicu timbulnya korupsi. (Nurlita,2021), samahalnya dengan warga Desa Kilensari, beberapa warga yang

seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak dapat bantuan dan akibatnya terjadi kecemburuan sosial.

Data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari pada tahun 2022- 2023- 2024 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah keluarga penerima manfaat**

No	Tahun	Jumlah Penerima BLT-Dana Desa
1.	2022	140 KPM
2.	2023	53 KPM
3.	2024	8 KPM

Sumber : Kantor Desa Kilensari

Data pada tabel 1.1 menunjukkan penurunan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sangat signifikan, dikarenakan dampak kemiskinan ekstrem dan dampak Covid-19 sudah banyak berkurang, dan lambat laun masyarakat Desa Kilensari telah mampu mandiri dan mencukupi kebutuhannya. Tetapi tidak sedikit yang menanyakan karena ada sebagian warga yang memiliki kekurangan maupun miskin ( keluarga miskin) tetapi tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. Sepertihalnya yang di utarakan oleh informan sebagai berikut :

“Saya kok tidak dapat Bantuan sama sekali ya? Padahal saya bisa tergolong masyarakat yang bisa mendapatkan Bantuan ya” ( Wawancara 07 Mei 2024 Pukul 10.00)

Berdasarkan uraian permasalahan di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023”

## 1.2 Rumusan Masalah

Pengertian Rumusan Masalah di dalam sebuah proposal penelitian merupakan hal paling mendasar. Rumusan masalah ini akan menjadi penentu mengenai pembahasan apa saja yang akan dilakukan di dalam penelitian tersebut. Dalam rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana analisis pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana Desa di Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2023
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengembangkan pengetahuan, dan membuktikan kebenaran. Penelitian juga bertujuan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah, Tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana Desa di Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program program Bantuan Langsung Tunai

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Sugiyono (2011) mengungkapkan pendapatnya bahwa penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang di bahas dalam penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Bagi Universitas**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk yang berguna terutama bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai tata cara pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai di Desa Kilensari.

### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang administrasi untuk ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pengalaman yang mengesankan bagi peneliti.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

Setelah permasalahan yang ada dalam penelitian dirumuskan, langkah berikutnya dalam proses penelitian adalah dengan menentukan teori-teori yang di gunakan. Tinjauan teori ini sangat penting dan diperlukan agar penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan berdasarkan coba-coba. Menurut Sugiyono (2016:54) mengatakan bahwa teori adalah logika untuk penalaran, yang merupakan sepekerjaan konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu dalam bentuk yang sederhana, teori merupakan sekumpulan antara dua variabel atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain yang telah diuji kebenarannya.

### **2.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana,2018). Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek antara lain yaitu:a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama. b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Iskandar, 2012). Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output (Hanafi and Ma`sum, 2015). Input kebijakan adalah agenda

pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Output sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dilahirkan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat.

Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai : 1) Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan; 2) Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri; 3) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang; 4) Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu (Jann, W and Wegrich, 2007). Maka dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.

Sebuah kebijakan harus dituangkan kedalam peraturan perundangan-perundangan. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan terdapat sistem yang bersifat memaksa dan mengikat. Sehingga dengan dimasukkannya kedalam sistem perundang-undangan, setiap kebijakan yang dihasilkan harus dilaksanakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu sebelum kebijakan tersebut diterapkan perlunya proses legitimasi oleh lembaga yang memiliki wewenang.

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari komoditas politik yang berkaitan dengan kepentingan publik (Alam, 2012). Namun kebijakan publik dapat diperbaiki apabila terjadi dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. Oleh sebab itu kebijakan publik bersifat fleksibel yang bisai diperbaiki dan di sesuaikan berdasarkan perkembangan pembangunan. Proses perbaikan dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan masyarakat. Kebijakan publik tidak

akan terlaksana apabila tidak ada proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan.

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

*Policy* atau yang biasa kita dengar dengan Kebijakan, biasanya seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, *goals*, program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan *policy makers* istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Menurut William Duun (1990), isu kebijakan adalah produk atau fungsi dari telah tersedianya perdebatan tidak memihak tentang definisi, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu (Dunn 2003).

Keban (2004: 55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa: "Public Policy dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya".

Syafiie (2006: 104), mengemukakan bahwa kebijakan *policy* hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan *wisdom* karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan

upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Abdoellah 2016). Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya (Sasawuk n.d.).

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat *tool* keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa seringkali terjadi diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting (Rusli 2013).

### 2.2.2 Tahap Kebijakan Publik

Suatau proses pembuatan kebijakan publik merupakan, proses yang kompleks. karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik, dengan membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

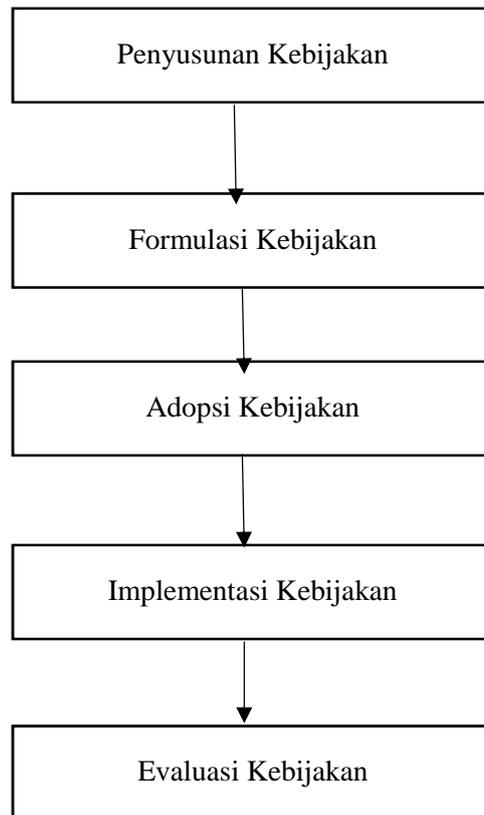
- a. Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus

kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

- b. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan *policy alternatives/policy options* yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing *actor* akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana *implementors*, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- e. Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik

yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Berikut gambaran tahap-tahap kebijakan, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan menurut William Dunn Sumber : dikutip Budi Winarno (2007:32-34)

### 2.2.3 Pelaksanaan Kebijakan Publik

Jika membahas kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumber daya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan (Mthethwa, 2012). Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia titik oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik.

Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islamy (2010) mengemukakan pengertian kebijakan publik sebagai berikut : publik, sebagai berikut: Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah.

- a. Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan *intended* atau dampak yang tidak diharapkan *spillover negative effect*.

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak

tertentu. Jann & Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

1. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan:
2. Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
3. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/ pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*stakeholders*). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pülzl & Treib, 2007).

#### 2.2.4 Elemen Utama Kebijakan Publik

Ada empat elemen utama yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan diantaranya adalah:

1. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Tujuan *goals*, merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
3. Perangkat *instruments*, alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
4. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak (Mustari 2015).

### 2.3. Program Bantuan Langsung Tunai

#### 2.3.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai atau bantuan lainnya kepada masyarakat miskin. Tujuan utama bantuan langsung tunai dana desa adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Bantuan langsung tunai (BLT) adalah suatu program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana bantuan langsung tunai dan mekanisme penyalurannya tergantung kepada kebijakan setiap negara penyelenggara. Istilah bantuan langsung tunai pertama kali dikenalkan di Brazil dan diadopsi oleh negara lain. Indonesia pertama kali melaksanakan bantuan langsung tunai pada tahun 2005 dilanjutkan pada tahun 2009 dan 2013. Istilah BLT diganti dengan BLSM (Bantuan langsung Sementara Masyarakat).

BLT dapat bersifat bersyarat (*conditional cash transfer*) atau tak bersyarat (*unconditional cash transfer*). Bantuan Langsung Tunai BLT merupakan salah satu model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Program ini

dirancang untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, terutama dalam situasi krisis atau pandemi seperti Pandemi Covid-19. Dalam program BLT, pemerintah memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga miskin dalam bentuk uang tunai atau bantuan lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. BLT dapat diimplementasikan dengan berbagai konsep, tergantung pada kebijakan dan tujuan pemerintah. Konsep BLT dapat melibatkan pemenuhan persyaratan tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah atau pemeriksaan kesehatan rutin, atau dapat diberikan tanpa persyaratan tertentu. Program BLT memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Melalui bantuan langsung tunai, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau disingkat BLT, bukanlah hal yang baru di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2005, di mana BLT mulai diluncurkan pertama kali, hingga berlanjut di tahun 2009 dan berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah merupakan salah satu dari sekian banyak model skema dukungan sosial yang berbasis pada dukungan sosial.

Menurut Wynandin Imawan seperti yang dikutip (Maun 2020:6) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Program BLT diselenggarakan atas tanggapan atas kenaikan harga bahan bakar global yang melambung tinggi. Masyarakat yang kurang mampu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah kemudian memberikan santunan berupa uang tunai, pangan, jaminan kesehatan dan pendidikan dengan tujuan untuk mengurangi beban kebutuhan sehari-hari masyarakat kurang mampu.

Namun, hari ini pemerintah telah memberikan definisi baru tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di mana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 (Infeksi virus corona). Adapun nilai BLT Desa adalah Rp 600.000 untuk 6 bulan berikutnya di tahun 2020. Dan menjadi Rp 600.000 per bulan untuk waktu 12 bulan. Tujuan, Manfaat dan Syarat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

#### a. Tujuan

Tujuan dari program bantuan langsung tunai antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
2. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa.
3. Membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.
4. Mewujudkan Desa tanpa Kemiskinan melalui BLT Dana Desa.
5. Mewujudkan penguatan ketahanan pangan.
6. Agar dana desa dapat di rasakan oleh seluruh masyarakat desa.
7. Mampu melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### b. Manfaat

Banyak manfaat yang dapat di peroleh oleh penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini, antara lain :

1. Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

2. Membantu masyarakat yang terdampak pandemi, dengan adanya bantuan ini masyarakat dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Membantu dalam situasi darurat, seperti kenaikan harga pokok, bencana alam atau pandemi.
4. Dapat meredakan kemiskinan dan ketidak setaraan, ini dapat membantu mereka mencapai standar hidup yang lebih baik.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Dalam peraturan permendes No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah menjelaskan bagaimana tatacara pelaksanaan bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang meliputi sebagai berikut :

1. Mekanisme Pendataan/Penetapan Penerima KPM.
2. Mekanisme Penyaluran.
3. Monitoring dan Evaluasi.

### 2.3.2 Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kriteria calon penerima Program Bantaun Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 Pasal 22 dari Ayat 1 sampai Ayat 3 tentang syarat penerima Bantuan dan Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa, syarat penerima program Bantuan Langsung Tunai sebagi berikut :

- a. Di berikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai penerima manfaat.
- b. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan
- c. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan Sosial pemerintah lainnya.

- d. Masyarakat yang dalam kategori, masyarakat miskin atau rentan miskin atau masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.

## **2.4 Konsep Kemiskinan**

### **2.4.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada

umumnya. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2014). Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2014). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2016).

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu.

#### 1. Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2. Ketidak berdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4. Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan- persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5. Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif

memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Kemiskinan juga memiliki beberapa jenis Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang, kemiskinan merupakan bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk

memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

#### 4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia.

#### 2.4.2 penyebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut Itang (2015) dalam penelitiannya menyebutkan penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern.

##### a. Faktor Internal

1. Sikap, suatu keadaan jiwa dan keadaan yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung melalui perilaku.
2. Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari tindakan dimasa lalu dan belajar. Hasil dari pengalaman akan membentuk pandangan terhadap suatu objek.
3. Kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.
4. Konsep diri. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku.
5. Motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise. Jika motif seseorang terhadap

kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung hedonis.

6. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.
- b. Faktor Eksternal
1. Kelompok referensi. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.
  2. Keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh akan membentuk kebiasaan yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.
  3. Kelas sosial. Sebuah kelompok yang relatif homogeny dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama.
  4. Kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normative, melalui ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.

Penyebab kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor menurut Hermawati, dkk (2015):

1. Kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*)
2. Rendahnya kemampuan (*low self capability*)
3. Kurangnya jaminan (*low level of security*)
4. Ketidakberdayaan (*low capacity empowerment*)

Bank dunia mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari persepektif akses dari individu terhadap sejumlah asset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni asset dasar kehidupan, asset alam, asset fisik, asset keuangan, dan set sosial. Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari asset-aset diatas adalah penyebab seseorang jatuh terjerembab kedalam kemiskinan. (Merna K. 2011)

Menurut Tambunan dalam Mauna, dkk (2018) tidak sulit mencari faktor penyebab kemiskinan. Tetapi sangat sulit memastikan faktor mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.

#### 2.4.3 Dampak Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Dengan adanya kondisi tersebut, kemiskinan memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat. Moh. Soerjani mengemukakan dampak kemiskinan yaitu:

1. Dampak kemiskinan terhadap orang-orang miskin sendiri dan terhadap lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, dengan sendirinya sudah jelas negatif. Dampak langsung adalah keterbelakangan dan rendahnya produktivitas.
2. Dampak kemiskinan terhadap lingkungan sosial tampak pada mengalirnya penduduk ke kota-kota tanpa bekal pengetahuan. Akibatnya sampai di kota bekerja sebagai tukang becak, pemulung, gelandangan dan pengemis yang menghuni kampung-kampung liar yang jorok digubuk-gubuk yang tidak pantas didiami oleh manusia.
3. Dampak lain dari kemiskinan ialah dampaknya terhadap lingkungan alam, sehingga dikatakan masalah lingkungan alam di Indonesia ini adalah masalah kemiskinan.

Menurut Itang (2015) kemiskinan memiliki dampak bagi orang yang menyandangnya, beberapa dampak dari kemiskinan antara lain:

- a. Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan. Pendidikan dan ketrampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, ini membuat masyarakat sulit berkembang dan sulit mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan untuk waktu yang lama.

- b. Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari pekerjaan membuat orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memperdulikan halal atau haramnya uang tersebut.
- c. Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tidak mampu membiayai sekolah. Ini akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah ketrampilan
- d. Kesehatan. Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini berakibat gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.
- e. Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat dari kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan terpaksa bekerja, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena seharusnya anak-anak mendapat hak untuk bahagia, pendidikan dan nutrisi yang baik. Keadaan ini akan menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.

## **2.5 Konsep Program**

Konsep program merupakan serangkaian suatu aktivitas atau tindakan yang dirancang dan diorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Konsep program dalam konteks kebijakan biasanya merujuk pada serangkaian kegiatan yang dirancang dan diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Namun mengubah program-program menjadi praktek tidak sesederhana sebagaimana tampaknya, dikarenakan berbagai alasan yang berkaitan dengan sifat dari permasalahan, situasi sekelilingnya, atau organisasi sebagai mesin administrasi yang bertugas melaksanakannya, maka program-program mungkin tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menyadari adanya keterbatasan- keterbatasan, dan mendorong kepada kita agar dapat memahami mengenai bagaimana proses kebijakan publik.

Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-undang RI nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi. Dengan demikian dalam pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat sebagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian untuk menjadi bahan referensi serta acuan bagi penelitian dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan perbandingan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	M. Razi Aswanda 2021	Evektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah Stidi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Hasil dari penelitian ini,menunjukkan bahwasanya masyarakat yang berpenghasilan tidak tetep masih bisa mencari pekerjaan. Dan penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai pemerintah sudah efektif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti, yaitu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kondisi ekonomi penerima bantuan langsung tunai sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.
2.	Lulu Ilhamdatun 2021	Program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Selama Pandemi COVID-19 Di Desa Ketangga, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Implementasi Kebijakan Program BLT di Desa Rensing masih kurang maksimal. Sistem pendataan masih menggunakan sistem senyataannya dengan demikian masyarakat yang seharusnya mendapatkan Dana Bantuan sering kali tidak dapat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19.
3.	Ayu Setyoningsih 2023	Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan kabupaten Madiun Perspektif Teori Keadilan	Hasil temuan dari penelitian tersebut tentang Penyakuran Bantaun Langsung Tunai(BLT) Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun masih belum cukup maksimal dan belum dilaksanakan secara adil, hal tersebut dibuktikan degan adanya masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut namun mendapatkan, sehingga tidak sesuai dengan kreteria yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa dalam perspektif teori keadilan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	Athallah Asyam Bahy Harianto	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Warga Terdampak COVID-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwasanya dalam pelaksanaan program pencarian Dana BLT pihak kantor desa mengundang pihak warga yang bersangkutan untuk datang ke lokasi kantor desa. persyaratan pencairan dana yaitu dengan datang sesuai dengan jadwal undangan yang telah dibagikan sebelumnya dan membawa kartu undangan dari kantor desa, membawa kartu pengenal serta pengambilan dana BLT tidak boleh diwakilkan, jika untuk warga lansia diharapkan ada yang mengantar.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap warga Terdampak Covid-19.
5.	Erfina Riska Hidayat	Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana persiapan, pelaksanaan, pengelolaan, efektivitas dan efisiensi dalam program Bantaun Pangan Non Tunai (BPNT)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian ini berfokus terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT)
6.	Harwidian syah 2011	Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya masyarakat belum mengerti dengan apa itu Bantuan Langsung Tunai, masyarakat menganggap bahwasanya BLT adalah pemberian secara Cuma-Cuma oleh pemerintah, sehingga banyak masyarakat ingin mendapatkan BLT padahal sebenarnya mereka tidak layak mendapatkannya. Banyak masyarakat penerima BLT yang berpendapat bahwasanya perbulan itu hanya cukup untuk membeli sembilan bahan pokok, oleh karena itu BLT belum bisa sejahtera dengan hanya mengandalkan BLT.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat dan penelitian ini menggunakan definisi oprasional

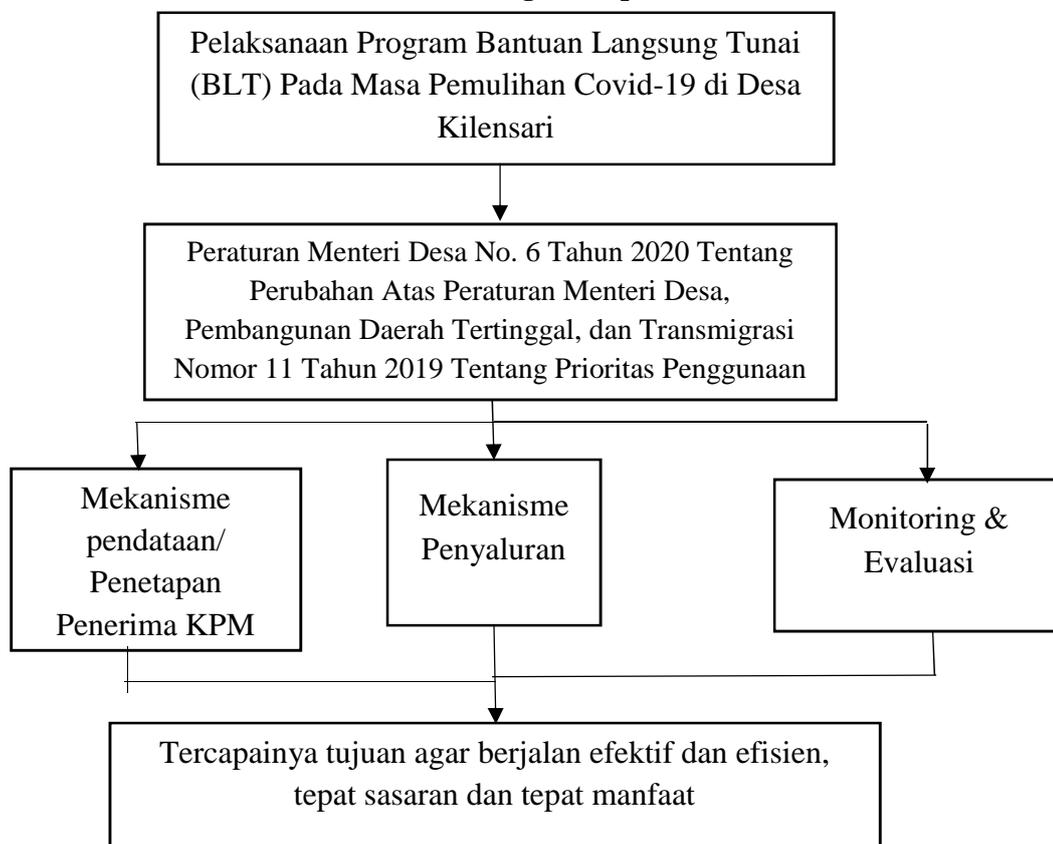
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
7.	Nelli Nurmala Sari 2021	Akutabilitas Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara	Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwasanya pendataan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat Desa, bantuan ini bersumber Dari Dana Desa. Walaupun dari proses penyalurannya kurang optimal yaitu tidak tepat waktu yang seharusnya setelah pendataan 5 hari selanjutnya sudah bisa di salurkan tetapi ini 2 minggu setelah pendataan baru disalurkan Pemerintah Desa seharusnya lebih memperhatikan dari segi ketepatan waktu, tetapi masyarakat menyebutkan tidak terlalu masalah karena pemerintah Desa sudah menjalankan Peyaluran Program BLT-DD dengan baik	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Akutanbilitas Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mamas baru.
8.	R. Finahari 2018	Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai ProgramKeluarga Harapan (PKH) Di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bintan secara umum dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja aparatur desa, karakteristik penerima program, pencairan dana BLT Desa, ketepatan waktu cairan dana BLT, tingkat keberhasilan dan kepuasan masyarakat .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian ini menggunakan metode Implementasi dan terlekat permasalahan pada objek yang akan diteliti

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
9.	Putri Windarti 2022	Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Muar Jalai	Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Muara Jalai masih belum optimal. Karena terdapat kendala-kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pengetahuan KPM BLT Dana Desa mengenai proses pendataan dalam menentukan peserta penerima bantuan, keterbatasan anggaran BLT Dana Desa, dan Kurangnya profesional kerja pihak desa dalam penyaluran dana bantuan sehingga mengakibatkan adanya penerima bantuan ganda dan muncunya kecemburuan sosial.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan Penelitian ini menggunakan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program BLT_DD pada masa pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19
10.	Asih Pitriani 2021	Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya secara umum sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, kriteria penerima bantuan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan, dan ditemukan bahwa masih banyak terdapat masyarakat miskin yang layak menerima tetapi tidak memiliki persyaratan dan tereliminasi dikarenakan pembagian kuota wilayah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme

## 2.8 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (Dalam Buku Sugiyono, 2016:60) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam penyusunan kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu membuat kerangka berpikir yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini. Dalam kerangka berpikir ini, peneliti akan menganalisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Sitbondo yang didasari pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Berikut kerangka berpikir yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pelaksanaan Program BLT DD.

**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**



## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Sugiyono(2018:2). Peneliti tersebut nantinya akan menciptakan jalan keluar maupun pemecahan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019:25), Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah keunikan objek makna suatu peristiwa proses dan interaksi sosial kepastian kebenaran data konstruksi fenomena temuan hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang tata cara pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pemulihan ekonomi dari masa pandemi COVID-19.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian untuk memperoleh data-data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian juga digunakan untuk membatasi wilayah penelitian dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

#### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama kurung waktu enam bulan yaitu dimulai pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan 06 Agustus 2024.

### **3.3 Sumber Data dan Jenis Data**

#### **3.3.1 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung yang meliputi sebagai berikut :

- a. Informan kunci ialah kepala desa dan penanggung jawab Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023
- b. Informan utama ialah staf Desa Kilensari panarukan yang ikut serta dalam kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- c. Informan pendukung ialah warga Desa kilensari panarukan yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

#### **3.3.2 Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2018:296) data primer yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung kepada para pengumpul data. Data primer pada penelitian ini ialah wawancara, dan observasi langsung dilapangan penelitian serta dokumen-dokumen yang terkait. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Sumber data primer ini juga diperoleh melalui pengamatan terhadap hasil pelaksanaan program Bantuan langsung Tunai Dana Desa.

##### **b. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2018:296) data sekunder merupakan sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data tertulis. Penelitian ini mengambil data sekunder dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan data yang diperoleh dari kantor Desa Kilensari Kecamatan Panarukan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:137) Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Tanpa menggunakan teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat digunakan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Wawancara memiliki dua teknik yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kedua teknik tersebut. Dengan menggunakan keduanya peneliti dapat menemukan jawaban yang sama namun dengan gaya yang berbeda.

#### 2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) (dalam Sugiyono, 2017:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang penyaluran Dana Bantuan khususnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

#### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi sehingga di dapatkan data yang maksimal, penelitian kualitatif memberi alternatif supaya setelah pengamatan dan wawancara sebagai cara yang paling dominan yaitu kajian terhadap dokumen/ bahan tertulis, yang lazim disebut dokumentasi yaitu

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prastasi, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat dukumentar seperti: tata letak geografis, struktur organisasi, gambar-gambar proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai.

### **3.5 Penentuan Informan**

Informan merupakan orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh penelitian dalam proses penelitiannya. Orang-orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan mengenai informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut.

Sanafiah Faisal (1990) (dalam Sugiyono, 2017:293) dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan kriteria diatas, informan yang ditentukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informan Kunci

Informan kunci memiliki peranan sangat penting, karena dalam proses pengumpulan dan verifikasi data penelitian. Informan kunci adalah orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Mereka adalah sumber informasi utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan beserta penanggung jawab penuh pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 ( Kaur Umum)

b. Informan Utama

Informasi utama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan pengalaman langsung tentang topik yang diteliti. Informasi utama dalam penelitian ini adalah (KAUR PERENCANAN, KAUR KESRA, KAUR KEUANGAN) dan seluruh staf kantor desa yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari.

c. Informan pendukung

Informan Pendukung merupakan informan yang dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian. Informasi pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Berikut adalah daftar informan yang akan dimintai informasi oleh peneliti :

**Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian**

No	Nama / Jabatan	Sebagai	Nama
1.	Kepala Desa Kilensari	Informan Kunci	Bpk. Sugiono
2.	Kaur Umum Selaku Penanggung Penanggung Jawab	Informan Kunci	Bpk. A.H. Rahman
3.	Kepala Urusan Perencanaan	Informan Utama	Bpk. Saningwar
4.	Kaur Keuangan	Informan Utama	Bpk. Yudi Hariyanto
5.	Staff Kantor Desa	Informan Utama	1. Bpk. Untung 2. Ibu Lia
6.	Masyarakat Penerima BLT-DD	Informan Pendukung	1. Ibu Sumiyati 2. Ibu Eta 3. Ibu Tolak

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

### 3.6 Teknik Analisis Data

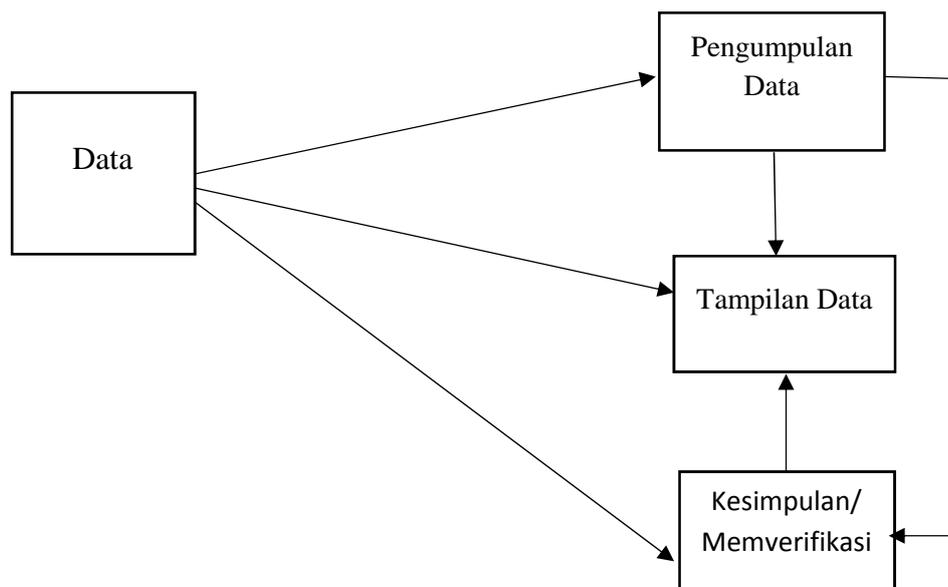
Menurut Sugiyono (2017:245) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan.

Analisis data di lapangan menurut Sugiyono, (2017:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data langsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan

melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*Interactive model*)



Sumber : Milesdan & Huberman (1992 : 20)

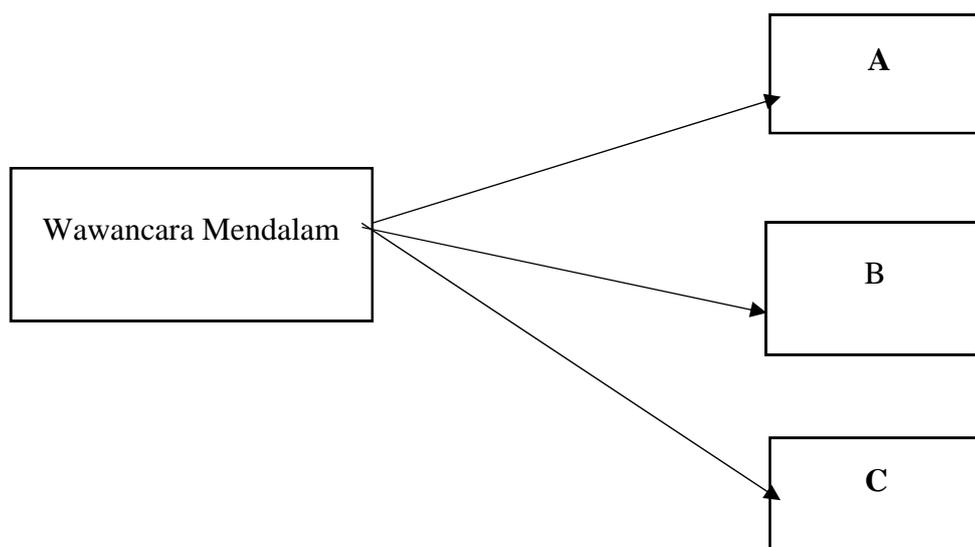
Reduksi Data ialah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara terperinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Penyajian Data dilakukan setelah reduksi data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Kesimpulan menggambar/memverifikasi menurut Milesdan Huberman (dalam Sugiyono 2017:252) adalah penerikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di temukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneli kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas menurut Sugiyono (2018:361) adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam sebuah penelitian kualitatif, suatu data bisa dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2018:368) triangulasi adalah pengecekan data dari banyak sumber dengan berbagai macam cara dan berbagai waktu.

**Gambar 3.2 Triangulasi Sumber : (Sugiyono, 2018:369)**



Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut nantinya dideskripsikan dan dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, nantinya akan menghasilkan kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan.

## BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Situbondo yang terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa dan berada dalam kawasan tapal kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung baluran dan lokasi usaha tambak udang dan perikanan. Kabupaten Situbondo terletak di posisi antara  $7^{\circ} 35'$  -  $7^{\circ} 44'$  Lintang selatan dan  $133^{\circ} 30'$  -  $144^{\circ} 42'$  Bujur timur dengan luas 1.638,50 km<sup>2</sup> atau 163.850 hektar dengan area hutan sekitar 73.994,90 ha dan kawasan pemukiman sekitar 24.183,23 ha bentuknya memanjang ke timur kurang lebih 150 km. Mayoritas penduduk di Kabupaten Situbondo berasal dari suku Jawa dan suku Madura. wilayah situbondo terbagi menjadi 17 kecamatan

Kabupaten Situbondo memiliki letak yang strategis, berdekatan dengan jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomian di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu yang paling aktif di Jawa Timur, karena para sopir angkutan barang selalu singgah dan beristirahat di tempat-tempat yang ada di wilayah ini. Kabupaten Situbondo mempunyai pelabuhan penumpang dan niaga bersama pelabuhan Penarukan yang terkenal sebagai ujung Timur dari jalan raya pos Anyer Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh *Daendels* pada era kolonial Belanda.



**Gambar 4.1 Peta Kabupaten Situbondo (Sumber : Wikipedia.org)**

#### 4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Desa Kilensari merupakan salah satu wilayah yang didominasi oleh pesisir dengan topografi dataran rendah. Desa Kilensari sendiri berada sekitar 15 Kilometer dari pusat kota Situbondo, Desa Kilensari terletak di antara selat Madura disebelah utara, Desa Kendit disebelah selatan, Desa Klatakan disebelah barat, dan Desa Wringin anom disebelah timur. Luas wilayah Desa Kilensari yaitu 4,98 km<sup>2</sup> atau 496 ha, dan sebagian besar Desa Kilensari merupakan kawasan pesisir pantai. Desa kilensari sendiri memiliki delapan Dusun diantaranya :

1. Dusun Pesisir Utara,
2. Dusun Pesisir Tengah,
3. Dusun Pesisir Selatan,
4. Dusun Tanah Anyar,
5. Dusun Somangkaan,
6. Dusun Karang Sari,
7. Dusun Kilen Selatan,
8. Dusun Bataan.

Pertumbuhan penduduk di Desa Kilensari cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebanyak 12.283 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 12.962 jiwa, dengan mayoritas dari suku Madura. Masyarakat Desa Kilensari memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda mulai dari nelayan, pengrajin, petani, buruh tani, peternak, kuli, pedagang, dan pekerja serabutan.

#### 4.1.2 Demografi Desa Kilensari

Jumlah penduduk setiap tahunnya berubah ubah, disebabkan adanya suatu proses seperti pernikahan, kematian, migrasi dan penuaan. Berdasarkan data berikut penduduk di Desa Kilensari sebanyak 15.192 Jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga kurang lebih sebanyak 4.855 KK, dengan jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 7.559 penduduk dan Perempuan sebanyak 7.633 penduduk. Dengan persentase sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	7.559	49.741%
2.	Perempuan	7.633	50.259%
<b>Jumlah</b>		<b>12.962</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Data monografi desa, 2024

Dari tabel diatas, dijelaskan bahwasanya dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa kilensari sebanyak 49.741% sedangkan penduduk perempuan di Desa kilensari sebanyak 50.259%.

#### 4.1.3 Ekonomi Desa Kilensari

Dapat di ketahui bahwasanya kemiskinan masih menjadi salah satu faktor penghambat suatu pembangunan di Indonesia, dan Kabupaten Situbondo masih menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dikutip Badan pusat statistik Kabupaten Situbondo Juli 2024.

**Gambar 4.3 Diagram kemiskinan, Jumlah penduduk miskin Kabupaten Situbondo, Maret 2014-2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Juli 2024

Gambar 4.2 Menunjukkan jumlah penduduk setiap tahunnya pada bulan Maret. Kemiskinan mengalami kenaikan dan penurunan, pada Maret 2014 sebesar

87,70 ribu jiwa, Maret 2015 91,17 ribu jiwa, Maret 2016 88,68 jiwa, Maret 2017 88,23 jiwa, Maret 2018 80,27 jiwa, Maret 2019, Maret 2020 83,74, Maret 2021 86,95 jiwa, Maret 2022 81,46 jiwa, Maret 2023 82,62 jiwa, dan Maret 2024 80,17 jiwa. Pada tahun 2020-2021 tingkat kemiskinan melonjak naik dikarenakan terjadinya wabah virus Covid-19. Naiknya tingkat kemiskinan tidak hanya di Kabupaten Situbondo, melainkan di provinsi dan nasional, juga ikut meningkat akibat dari dampak Covid-19.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kilensari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melaksanakan berbagai jenis pekerjaan, berikut jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya :

**Tabel 4.2 Profesi Yang Ada Di Desa Kilensari**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Nelayan	692	28,7 %
2.	Petani	446	18,5%
3.	Pengrajin Industri	281	11,6%
4.	Buruh Migran	338	14,0%
5.	Pedagang	270	11,2%
6.	Aparatur Sipil Negara	82	3,4%
7.	Buruh Tani	226	9,4%
8.	Peternak	26	1,1%
9.	Dokter	4	0,2%
10.	Bidan	4	0,2%
11.	Porli/TNI	44	1,8%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.413</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data monografi desa, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwasanya mayoritas penduduk di Desa Kilensari berprofesi sebagai nelayan.

#### 4.1.4 Rincian Dana Desa Kilensari

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikut dibawah ini, besaran anggaran penyaluran dana desa beserta tahapannya: adalah rincian dana yang terdapat di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

**Tabel 4.3 Penyaluran Dana Desa Di Desa Kilensari**

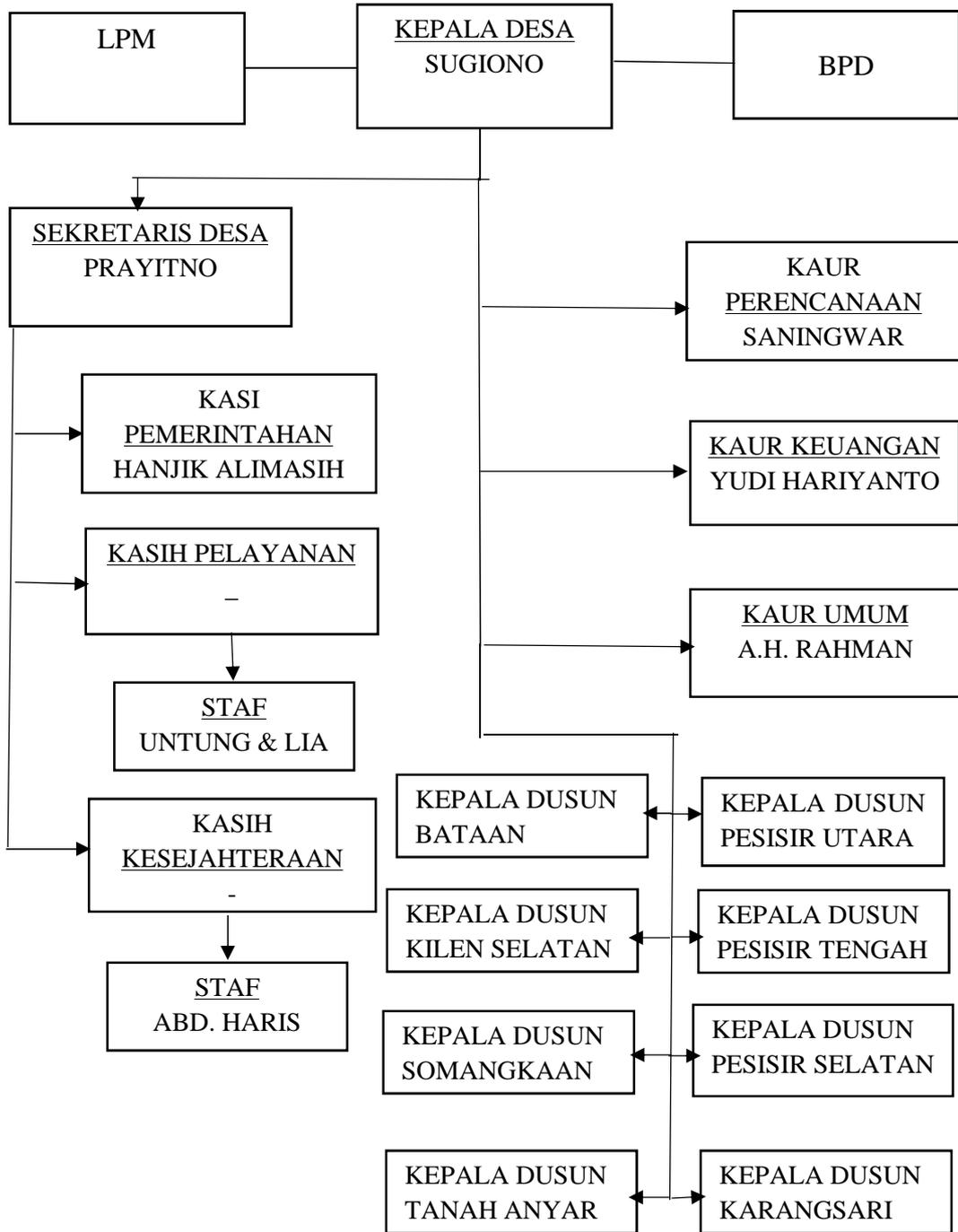
Penyaluran	Jumlah
Tahap (1) 30 Mei 2023	Rp. 546.660.900
Tahap (2) 04 Juli 2023	Rp. 403.560.900
Jumlah Penyaluran	<b>Rp. 950.221.800</b>

Sumber : Data monografi desa, 2024

#### 4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang ada pada setiap organisasi agar pekerjaan yang dilakukan lebih teratur dan tertata secara sistematis, efektif, dan efisien. Berikut struktur organisasi perangkat yang ada di kantor Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

Gambar 4.5 Struktur Organisasi Desa Kilensari



Sumber : Data monografi desa, 2024

#### 4.1.4 Sarana dan Prasarana Desa Kilensari

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat Desa Kilensari untuk meringankan aktivitas keseharian masyarakat. oleh sebab itu Desa ini diperlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk Desa setempat. Adapun sarana dan prasarana di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Di Desa Kilensari**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Apotik	3
2.	Gereja	2
3.	Kantor Desa	1
4.	Jembatan	4
5.	Posyandu	16
6.	Masjid	5
7.	Musholla	55
8.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
9.	Sekolah Dasar (SD)	7
10.	Sekolah Menengah Pertama	2
11.	Sumur Pompa	40
12.	Tempat Pembuatan Sampah Sementara	3

Sumber : Data Profil Desa Kilensari 2024

Berdasarkan data dari Tabel 4.3, dapat di ketahui bahwasanya banyak sarana dan prasarana yang ada di Desa kilensari. Mulai dari sarana dan prasarana pendidikan, tempat ibadah, tempat kesehatan, dan saluran kehidupan.

#### 4.1.5 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah suatu bantuan berupa uang kepada masyarakat, dengan melalui proses tertentu tanpa melalui perantara dan bebas pajak. Menurut Wynandin Imawan Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi atas tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai ini termasuk kepada klaster 1, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Yang termasuk

kedalam klaster 1 tersebut ialah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Program Bantuan Langsung Tunai ini merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program ini ditujukan untuk memecahkan persoalan-persoalan kemiskinan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada.

Bantuan Langsung Tunai memiliki landasan hukum yang kuat, berikut beberapa landasan hukum terkait Bantuan Langsung Tunai :

1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengaturan yang terkait dengan BLT Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A dan pasal 50.
5. Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
6. Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
7. Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020

perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian adalah suatu proses yang melakukan beberapa pengelompokan terkait suatu data yang telah didapatkan sebelumnya menggunakan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan dengan melakukan observasi di lapangan.

### **4.2.1 Persiapan**

Persiapan ialah merupakan suatu tahapan awal yang ada pada setiap kegiatan yang ada, dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Persiapan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam setiap bagian kegiatan, karena persiapan yang baik akan membantu memastikan kesuksesan dan efektivitas pelaksanaan aktivitas tersebut.

Tahapan persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yaitu tahap koordinasi pelaksanaan. Dalam tahap koordinasi pelaksanaan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa seperti koordinasi dari kepala seksi kesejahteraan, Kepala Urusan umum, Kepala Urusan perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan. Peneliti juga mewawancarai informan Kepala Desa tentang bagaimana persiapan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam persiapan suatu kegiatan, saya akan menunjuk seseorang untuk menjadi penanggung jawab dalam kegiatan ini, untuk memudahkan saya dalam merembuk atau membicarakan tahapan-tahapan yang akan dijalankan setelahnya”.

Peneliti juga mewawancarai informan Kepala Urusan Perencanaan tentang apa saja yang harus dilakukan dalam persiapan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berikut penampaiannya :

“Seperti biasanya setiap kali kegiatan pasti ada persiapan yang harus direncanakan secara matang, biasanya persiapan dalam pelaksanaan pembagain Bantuan Langsung Tunai(BLT) melibatkan beberapa pihak mulai dari Kepala desa, staf desa, 8 kepala dusun sekilensari, RT sekilensari, RW sekilensari dan diketetuai oleh kepala seksi kesejahteraan, akan tapi karena kepal seksi sekesajteraan Desa Kilensari kosong jadi kegiatan ini dialih

tanggung jawabkan kepada Kepala Urusan Umum” (Hasil wawancara 07 Mei 2024 Pukul 09.22 WIB)

Didukung juga dengan hasil wawancara dari Ibu Lia selaku staf kantor desa, beliau mengutarakan bahwa :

“Sehubungan sedangkan adanya pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa ini, biasanya pemerintah desa akan merembukkan kapan akan dilaksanakannya bundes, karena semakin cepat dilaksanakan makan akan semakin baik”.

#### 4.2.2 Mekanisme Pendataan/ Penetapan penerima KPM

Setelah tahap persiapan dilakukan tahap selanjutnya ialah penyiapan data keluarga penerima manfaat. Dalam tahap ini pemerintah desa melakukan pendataan pada setiap warga desa yang telah memenuhi kreteria penerima bantuan langsung tunai tersebut. Dalam mekanisme pendataan penerima BLT, desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. kemudian pemerintah desa dapat melihat dari data penerima bantuan lainnya, dikarenakan dalam penerimaan bantuana langsung tunai ini calon penerima BLT-Dana Desa tidak termasuk penerima bantuan sosial apapun seperti:

1. Program Keluarga Harapan (PHK)
2. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. Kartu Sembako,
4. Kartu Prakerja,
5. Batuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial lainnya.

Tidak hanya sampai disitu, desa juga mengadakan musyawarah desa untuk benar-benar memastikan bahwasanya penerima bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran, dengan diperkuat dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bapak Rahman selaku pengganti penanggung jawab Bantuan langsung tunai yang baru, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam penyiapan data penerima, aparatur desa tidak melilih sekehendaknya atau mendata sekedarnya. Biasanya satu atau dua minggu sebelum dana desa turun, desa mengadakan rapat yang biasa di sebut musdes untuk menentukan masyarakat yang benar-benar layak dapat bantuan, dan apalagi BLT- Dana Desa ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lainnya. kalau ditanya kenapa harus jauh-jauh hari untuk menyiapkan data

penerima, ya karena pada saat dana desa keluar, desa tinggal menyalurkan, apa lagi desa tidak bisa menyimpan dana desa yang sudah turun terlalu lama”.

Samahalnya dengan yang diutarakan oleh Bapak Sugiono selaku kepala Desa Kilensari beliau mengutarakan bahwa :

“ Dalam penentuan penerima bantuan langsung tunai dana desa pemerintah desa biasanya akan mengadakan Musdes yang dihadiri kepala oleh 8 Kepala Dusun RT dan RW seluruh kilensari”

Dalam proses ini Bapak Saningwar juga menambahkan bahwa :

“Dengan mengadakannya Musdes, lebih memudahkan pemerintah desa dalam memilih calon penerima bantuan langsung tunai dana desa ini. Dengan berbagi pendapat dan suara mengenai calon keluarga penerima manfaat pemerintah desa dapat dengan hati-hati memilih calon penerima”.

Dalam proses pendataan untuk menentukan calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, desa memiliki hak penuh dalam menentukan calon penerima manfaat selama mereka memenuhi kriteria calon penerima. Dalam pendataan aparatur desa harus transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Panitia pelaksana dapat menggunakan data desa sebagai panduan serta merujuk pada DTKS untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang telah menerima bantuan sosial seperti bantuan PHK, Bantuan Pangan Non Tunai, dan bantuan lainnya, dengan itu aparatur desa dapat mengetahui siapa saja masyarakat yang belum menerima bantuan. Seperti yang dipaparkan di atas berikut proses penyiapan data KPM sebagai berikut :

#### 1. Penerbitan SK

Kepala desa menerbitkan SK (surat Kuasa) sebagai penunjukan tim pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Terbitnya Surat Kuasa yang diterbitkan kepala desa diberikan kepada Kaur Umum sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. seperti yang telah dikatakan oleh bapak kepala desa sebagai berikut :

“ Kalau SK (Surat Kuasa) turun, biasanya diberikan kepada Kaur umum selaku penanggung jawab bantuan ini yaaa, dengan itu kaur umum dapat langsung membentuk tim yang akan bekerja dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan tersebut”.

Samahalnya dengan yang diutarakan oleh bapak Rahman selaku kaur umum mengatakan bahwasanya :

“ Jika surat kuasa sudah turun dan diberikan kepada saya, saya biasanya langsung membentuk tim pelaksana dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai dana Desa ini. tapi jika surat kuasa belum turun, saya gak berani untuk membentuk tim ataupun melaksanakan kegiatan lainnya, apa lagi resikonya besar dek...”

Dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya tanpa adanya surat kuasa, dapat menghambat proses pelaksanaan atau keputusan yang perlu diambil.

## 2. Pendataan

Dalam tahap ini tim yang telah di tentukan akan melakukan pendataan dan di konsultasikan dengan Kepala Dusun, RT dan RW. Bapak rahman selaku penanggung jawab Bantuan langsung Tunai Dana Desa mengatakan bahwa :

“Pada tahap pendataan, tim pelaksanaan biasanya mengadakan MUSDES (musyawarah Desa) yang biasanya dihadiri Kepala Dusun, Rt, Rw untuk menentukan calon penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria atau tepat sasaran, dalam pendataan kepala dusun, Rt, Rw memiliki peran yang sangat besar dikarenakan mereka yang dapat memberikan informasi yang pasti tentang calon penerima, kenapa demikian, karena kami sendiri yang tau personal mereka, kenapa demikian karena masih terdapat keluarga yang tercatat miskin atau kurang mampu pada tahun 2010 hingga sekarang masih tercatat demikian, padahal sudah termasuk cukup mampu. Oleh karena itu kepala dusun, Rt, Rw dapat memastikan detail tentang calon penerima”.

## 3. Verifikasi, Validasi

Pada tahap ini, panitia dapat memasikan data peneima lengkap seperti NIK dan kepemilikan dokumen kependudukan. Namum jika terdapat calon penerima bantuan langsung tunai dana desa yang tidak memiliki NIK, petugas desa dapat membuatkan surat keterangan domisili. Pernyataan di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Lia selaku staff desa dan tim pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, beliau mengutarakan bahwa :

“Biasanya kalau dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terdapat warga yang tidak punya KTP saya akan membuatkan surat domisili dari desa untuk membuat KTP, KTP sangat diperlukan karena untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar dari Desa Kilensari”.

#### 4. Penandatanganan daftar nama calon penerima

Pada tahap ini nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diajukan kepada kepala Desa dan BPD dan di tandatangani.

#### 5. Publikasi Daftar

Mempublikasikan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tempat umum ( di depan kantor desa) website desa. seperti halnya juga yang diutarakan oleh Bapak Rahman selaku penanggung jawab mengutarakan bahwa :

“ Apa bila daftar nama yang sudah dikumpulkan sudah disepakati maka selanjutnya akan dilakukan penguploadan data ke sistem DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) untuk benar-benar memastikan bahwasanya calon penerima bantuan ini belum pernah mendapatkan bantuan lain dan setelah itu di publikasikan di depannkantor desa“.

#### 6. Pengesahan Daftar

Pengesahan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh Bupati/wali kota atau diwakili camat. Pada tahap ini merupaka tahap akhir dalam tahap pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa. Dengan diperkuat dengan hasil wawancara denga Bapak Rahman selaku penanggung jawab mengatakan bahwa :

“ Setelah dilakukan Verifikasi, Validasi pada calon penerima bantuan langsung tunai dana desa maka selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan dan dilaporkan kepada Bupati atau diwakili camat untuk pengesahan”.

Dapat disimpulkan bahwa tahap terakhir dalam penentuan keluarga penerima manfaat adalah pengesahan daftar nama peserta calon penerima manfaat.

#### 4.2.3 Mekanisme penyaluran BLT-DD

Mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk pendataan dan penyaluran (pendistribusian) Dana Desa dilaksanakan secara bertahap. Di mana pendataan calon penerima BLT Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan berdasarkan database perlindungan sosial terpadu kementerian sosial atau lebih dikenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DSKS) yang diperoleh dari kementerian sosial. Mekanisme penyaluran bantuan langsung secara umum meliputi sebagai berikut :

1. pemerintah desa menetapkan perencanaan penggunaan Dana Desa termasuk alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
2. persetujuan rencana penggunaan Dana Desa termasuk alokasi Bantuan Langsung Tunai dan disetujui secara kolektif oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Setelah tahap persetujuan, Dana Desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Bapak Yudi selaku kaur keuangan juga menambahkan bahwa :

“Biasanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari hingga Desember, besaran dana ini sekitar 600.000 per KPM atau keluarga penerima manfaat”.

4. Identifikasi penerima manfaat yang ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, biasanya sebagai berikut :
  - a. Identifikasi keluarga miskin dan rentan yang menjadi prioritas penerima BLT Dana Desa
  - b. Rumah tangga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa.
  - c. Rumah tangga miskin penerima kartu pra kerja dikeluarkan dari daftar potensi penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

Pernyataan diatas juga di dukung oleh Bapak Untung selaku staff kantor desa mengutarakan bahwa :

“Saya sebagai staff desa dan selaku anggota tim pelaksana memiliki tugas untuk mengecek kembali apakah calon penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria itu, dilakukan pengecekan kembali agar memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria apa tidak”.

5. Pemberitahuan, biasanya keluarga penerima manfaat diberitahu secara resmi tentang jumlah bantuan yang akan diterima dan prosedur pencaira. Sama halnya dengan yang di utarakan oleh Bapak Rahman selaku penanggung jawab mengatakan bahwa :

“Biasanya sebelum penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, aparatur desa akan mengadakan sosialisasi program bantuan langsung dana desa kepada masyarakat dengan menginformasikan besaran jumlah dana yang

akan di terima, bagaimana cara pengambilan dana tersebut, dan tempat pengambilan dana bantuan tersebut”

6. Pencatatan dan verifikasi data penerima manfaat dicatat dengan cermat dan diverifikasi agar penyaluran dana tepat sasaran.
7. Pencairan tunai bantaun langsung, yang disalurkan langsung kepada penerima, biasanya melalui kantor pos setempat.

Di perkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bapak rahman selaku penanggung jawab bantuan langsung tunai dana desa mengatakan bahwa :

“kalau pencairan bantuan langsung tunai dana desa ini biasanya di kantor pos. Keluarga penerima manfaat ini biasanya harus berkumpul di kantor pos dan mendatangi petugas kantor pos”.

8. Pemantauan dan evaluasi dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas dan transparasi dalam penggunaan dana.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan setiap bulan tanpa syarat. Mekanisme pengawasan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan melalui sistem pemantauan yang melibatkan pemantau dan pengawas Dana Desa. dengan diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak saningwar selaku Kepala Urusan Perencanaan yang mengatakan bahwa :

“Dalam proses pengawasan ini, biasanya pemerintah desa diawasi sama Badam Permusyawaratan Desa/BPD dan ada juga dari pemerintah kecamatan untuk mengamati jalanya penyaluran bantuan langsung tunai ini”.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan dalam proses penyaluran atau pendistribusian bantuan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat dan jalanya proses penyaluran bantuan tersebut. Proses penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Kilensari ini dilakukan secara tunai di kantor pos yang sudah di tentukan oleh desa. disalurkan secara tunai dikarenakan akan mempermudah masyarakat yang menerima. Didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku penanggung jawab beliau mengatakan bahwa :

“ Penyaluran bantuan ini dilakuakn secara manual atau *chas* untuk mempermudah masyarakat yang menerima, jika disalurkan dengan melibatkan Bank, itu malah bikin ribet, bukan hanya untuk masyarakat yang menerima karena harus buat akun Bank, tapi juga untuk aparatur desa”.

Bapak Rahman selaku kepala penanggung jawab dalam urusan bantuan langsung tunai dana desa ini juga mengutarakan bahwa :

“Dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini biasanya melalui beberapa tahap, kenapa ada tahap-tahapnya, yaaa dikarenakan dana desa kan tidak semuanya turun yaaa dek, juga ada tahap-tahapnya, oleh karena itu dalam proses penyaluran bantuan ini juga melewati beberapa tahap.. dan biasanya Tahap pertama di berikan pada perkiraan bulan April, Tahap kedua di berikan pada bulan Mei, Tahap ketiga di berikan pada bulan Juni , Tahap keempat pada bulan Juli, Tahap kelima bulan Agustus, dan Tahap keenam bulan September dengan besaran berjumlah Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)”.

Ketepatan waktu juga menjadi tolak ukur dari evaluasi dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Menurut pedoman pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketepatan waktu pelaksanaan distribusi tercapai apabila penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan sesuai dengan rencana distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yaitu setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Ketepatan waktu dalam penyaluran akan sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

#### 4.2.4 Monitoring dan Evaluasi

Setiap program Bantuan yang pemerintah berikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarat. Keluarga penerima manfaat dapat merasakan manfaat dari adanya bantuan tersebut, sepertihalnya peningkatan kesejahteraan atau peningkatan kualitas hidup dan meningkatkan akses terhadap layanan publik. namun apakah benar, program yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi yang menerima atau tidak. Dengan itu, dalam program ini juga mempunyai tahapan monitoring dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan atau memantau apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi kita dapat mengetahui atau memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik atau tidak. Dengan itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang menerima bantuan.

Informasi yang didapatkan dari keluarga penerima manfaat ibu Sumiyati mengatakan sebagai berikut :

“ya saya alhamdulillah dapat bantuan ini, kalau ditanya bagaimana manfaat yang dirasakan, yaaa saya bersyukur uang itu bisa jadi tamba-tambahan buat beli kebutuhan pokok lain. Saran dan keritik untuk tim pelaksana ini semoga kedepannya lebih baik lagi dalam segipelayanannya yaa dan saya harap pemerintah dapat mendata penerima bantuan dengan benar dan tepat sasaran ya (Hasil wawancara pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 pukul 15.30 WIB

Senada dengan wawancara yang dilakuakn peneliti dengan keluarga penerima manfaat lainnya dengan Ibu Eta, beliau mengatakan bahwa :

“Manfaat yang saya rasakan sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa dapat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan pokok, apalagi saya cuman buruh harian, kalau gak kerja sehari ya gak dapat uang, tapi karena saya dapat bantuan ini, yaa lumayan lah dek bisa kebantu walau gak seberapa, ya tapi saya bersyukur masih ada yang bisa dibuat bantu-bantu, dari pada tidak dapat ya” (Hasil wawancara pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 Pukul 16.00)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 07 Juni 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan selaku penerima manfaat Ibu Tolak mengatakan sebagai berikut :

“Dengan adanya bantuan ini yang saya rasakan cukup lumayan membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok. Apa lagi harga pokok sekarang sudah naik semua yaaa”(wawancara 07 Juni 2024 pukul 10.00 WIB)

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa ini, terdapat banyak masyarakat yang cukup terbantu dengan adanya program ini. Namun bagaimana bagi masyarakat yang merasa tidak menerima program Bantaun Langsung Tunai Dana Desa ini. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum’at tanggal 12 Juni 2024 dari informasi yang didapat dari Bapak Rahman selaku penanggung jawab pelaksanaan program ini mengatakan bahwa :

“kalau ditanya bagaimana bagi masyarakat yang tidak menerima BLT-DD ini, ya mau gimana dek, kadang ada masyarakat yang pingin dapat bantuan ini, karena mereka merasa layak dapat bantuan, padahal sudah dapat dari bantuan lain. Sedangkan bantuan ini fokusnya pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari bantuan lainnya. ada juga yang tidak pernah dapat bantuan sama sekali dan pingin dapat BLT-DD, akan tetapi dia tidak

memenuhi syarat seperti dia tidak termasuk dalam bagian keluarga miskin atau tidak mampu. Ada juga yang merasa layak mendapatkan BLT-DD ini karena sudah memenuhi kriteria dan kalau ada warga yang belum dapat bantuan apapun dan masih belum juga dapat bantuan langsung tunai dana desa kemungkinan warga yang tidak dapat itu tidak memiliki KTP dan berbeda domisili dengan yang ada di KTP, karena masih terdapat masyarakat yang tinggal di Desa Kilensari akan tetapi alamat KTP bukan di Desa Kilensari”.

”(Hasil wawancara pada hari Jum’at tanggal 12 Juni 2024 pukul 11.00 WIB).

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh kecamatan dan anggota desa, untuk mengetahui dimana letak kesalahan atau kurang tepatnya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

#### 4.2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan

Pada dasarnya setiap kegiatan apapun pasti akan memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung membantu memperkuat, mendukung atau meningkatkan pelaksanaan suatu tujuan dengan memberikan dukungan yang positif. Dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa ini terdapat beberapa faktor positif. Berikut beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari Panarukan antara lain :

1. Ketersediaan sumber daya seperti halnya sumberdaya manusia yang mendukung, keuangan, dan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu dapat membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. Peneliti juga mewawancarai Bapak Saningwar selaku Kepala Urusan Perencanaan, beliau mengutarakan bahwasanya :

“Dengan adanya ketersediaan sumber daya dapat membantu pelaksanaan program. Biasanya kalau kurangnya tenaga pendukung, akan menghambat pelaksanaan. Jadi hal yang paling utama yaitu tenaga sumber daya manusianya”.

2. Terjalannya kerjasama yang baik antara pihak yang berkesinambungan, baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat dapat memperkuat implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. Peneliti juga

mewawancarai Bapak Saningwar selaku Kepala Urusan Perencanaan, beliau mengutarakan bahwasanya :

“Biasanya dalam pelaksanaan program, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, terutama masyarakat sangat diperlukan, untuk mempermudah proses pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, dengan masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan dapat mempermudah proses pelaksanaan. Dengan itu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program”.

3. Terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, hal ini menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Rahman selaku penanggung jawab program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, beliau mengutarakan bahwa :

“ Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, di Desa Kilensari menerapkan keterbukaan, di karenakan keterbukaan dapat mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan, karena jika keterbukaan tidak dilaksanakan akan menimbulkan pro dan kontra”.

Dengan hasil wawancara diatas dengan Bapak Rahman, dapat di simpulkan bahwasanya keterbukaan atau transparansi dapat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Diatas telah dijelaskan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Jika terdapat faktor pendukung pasti terdapat juga faktor penghambat, karena terdapat keterkaitan atau ketidak seimbangan kekuatan. Oleh karena itu, berikut beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Minimnya pengetahuan masyarakat

Biasanya dalam hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan program tersebut. Sepertihalnya yang diutaran oleh Bapak Saningwar selaku kaur perencanaan mengatakan bahwa :

“Minimnya pengetahuan dan informasi yang di ketahui oleh masyarakat membuat pemerintah yang menangani kesulitan dan harus menjelaskan menjelaskan berulang kali.”

Tidak hanya itu masyarakat yang tidak mengerti tentang bantuan ini, dan tidak termasuk salah satu penerima manfaat akan cemburu.

## 2. Terdapat masyarakat yang tidak memiliki NIK

Dalam persyaratan calon penerima manfaat salah satunya harus memiliki NIK atau nomor induk kependudukan. Sedangkan di masyarakat Desa Kilensari masih terdapat masyarakat yang belum memiliki NIK. Dengan itu mereka harus membuat NIK yang dimana itu dapat menghambat keterlambatan proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini. Pernyataan diatas didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Lia selaku staff desa dan tim pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, beliau mengutarakan bahwa :

“Biasanya kalau dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terdapat warga yang tidak punya KTP akan saya buat surat domisili dari desa untuk membuat KTP, KTP sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan. Namun dengan warga yang tidak punya KTP dan harus membuat baru, dengan itu ini dapat menghambat proses pelaksanaan”.

Dengan hasil wawancara dengan Ibu Lia dapat di tarik kesimpulan, bahwasanya masyarakat yang tidak memiliki KTP dapat menghambat proses pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa.

## 3. Tingkat kecemburuan sosial yang tinggi

Tingginya tingkat kecemburuan sosial yang tinggi dapat menjadi faktor penghambat dalam proses penyaluran bantuan sosial ini. Bapak Saningwar selaku Kepala Urusan Perencanaan juga mengutarakan bahwa :

“Banyaknya masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa dikarenakan tidak memenuhi kriteria, biasanya ini akan menimbulkan cemburu sosial, biasanya yang cemburu sosial itu tidak begitu mengerti sama persyaratan-persyaratannya, cuman dengar tetangga atau temannya dapat jadi merasa tidak adil dan cemburu sosial, kan padahal tidak begitu. Terkadang dia dapat bantuan lain dan tetangganya tidak, akhirnya program ini tetangganya dapat, ya saya bisa apa, itu kan naluri mereka, mau di jelaskanpun terkadang mereka masih belum paham juga imbuhnya”.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Mekanisme Pendataan/Penyiapan Data KPM

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa perlu diketahui bahwasanya penyiapan data Keluarga Penerima Manfaat sangat diperlukan untuk mengetahui target penerima bantuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwasanya dalam tahap penentuan daftar penerima, desa memiliki peran penuh dalam menentukan calon penerima manfaat. dapat diketahui bahwa desa memiliki peran penuh dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini.

9. Mulai dari penyiapan data Keluarga penerima Manfaat, desa wajib mengeluarkan Surat Kuasa untuk mempermudah tim pelaksana dalam mendata calon penerima manfaat, jika halnya desa tidak mengeluarkan surat kuasa maka tim pelaksana tidak berhak mendata calon penerima manfaat selama desa belum mengeluarkan surat kuasa.
10. Desa perlu mengadakan musyawarah desa dengan melibatkan Kepala Dusun, RT, dan RW untuk bermusyawarah dalam meloloskan berhak tidaknya nama-nama calon penerima manfaat yang telah di data oleh tim pelaksana.
11. Desa perlu membuat surat keterangan domisili bagi calon penerima yang tidak memiliki NIK.
12. Kepala desa dan BPD menandatangani berkas yang berisi nama calon penerima manfaat. Kelima desa perlu mempublikasikan atau mengumumkan daftar calon penerima manfaat yang telah ditetapkan.
13. Desa perlu mengajukan pengesahan daftar nama calon penerima manfaat kepada bupati untuk di tandatangi. Data calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari pada tahun 2023 sebanyak 53 KPM sedangkan calon penerima pada tahun 2024 sebanyak 8 KPM.

Hasil penelitian dalam penyiapan data keluarga penerima manfaat, desa memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan calon penerima manfaat. Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama Bapak A.H Rahman beliau mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran besar dalam menentukan calon

penerima manfaat dikarenakan mereka apatar desa yang dapat memberikan informasi yang pasti tentang calon penerima, kenapa demikian, karena kami sendiri yang tau personal mereka, kenapa demikian karena masih terdapat keluarga yang tercatat miskin atau kurang mampu pada tahun 2010 hingga sekarang masih tercatat demikian, padahal sudah termasuk cukup mampu.

#### 4.3.2 Mekanisme penyaluran BLT DD

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwa dalam mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan di Desa Kilensari, terdapat beberapa prosedur diantaranya sebagai berikut :

1. Desa telah menetapkan atau merencanakan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai dana desa tersebut,
2. Pemerintah desa menentukan calon penerima manfaat seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam penyiapan data keluarga penerima manfaat,
3. Pemerintah desa memberitahu kepada calon penerima tentang jumlah besaran uang yang akan diterima dengan mengadakan sosialisasi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara berama Bapak A.H Rahman beliau mengutarakan bahwasanya sebelum penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah desa akan mengadakan sosialisasi tentang program bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat dengan menginformasikan tentang besaran jumlah uang yang akan di dapat dan cara pengambilan dana bantuan.
4. Pencairan dana bantuan langsung tunai di Desa Kilensari dilakukan di kantor pos hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama bapak A.H Rahman beliau menuturkan bahwasanya pencairan dana dapat diambil melalui kantorpos yang telah ditentukan oleh kantor desa dengan metode tunai, yang kelima pengawasan, biasanya pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Kecamatan.

#### 4.3.3 Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, dengan adanya bantuan langsung, masyarakat secara langsung dapat merasakan manfaat dari adanya bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah, tidak hanya itu masyarakat dapat terbantu secara ekonomi. Menurut William N Dunn dalam (Pengantar Analisis Kebijakan Publik 2013) bahwa evaluasi program memerlukan kriteria yang dirancang untuk mengukur keberhasilan dari suatu program. Terdapat 6 kriteria yang dijelaskan oleh William N Dunn yang di antaranya sebagai berikut: Efisiensi, Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsifitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Efisiensi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa ini bisa dibilang cukup baik, dikarenakan waktu dalam pelaksanaan cukup sesuai, atau cukup tepat waktu, mengapa masih cukup, bukan tepat waktu, di karenakan biasanya dalam waktu pelaksanaan yang kurang tepat waktu, di karenakan dana desa yang belum turun sepenuhnya. Tenaga kerja atau sumber daya yang di gunakan dalam pelaksanaan menggunakan aparatur desa.

Efektivitas merupakan suatu kriteria evaluasi dalam mengukur suatu keberhasilan suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Efektivitas dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa ini dengan melihat berhasil tidaknya pelaksanaan ini dalam membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan harian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa efektivitas dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunia ini, bisa dibilang cukup efektif dan sesuai dengan tujuan program BLT-DD. Karena Tujuan utama bantuan langsung tunai dana desa adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan harian.

Ketepatan pada suatu kebijakan dapat diukur dengan melihat apakah tujuan suatu program dapat dicapai, dengan melihat apakah relevan dengan kelompok sasaran dan mampu menciptakan dampak yang diinginkan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dilapangan, bahwa bantuan yang didapat, dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Namun masih tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan ini, seperti halnya yang di utarakan oleh Bapak A.h Rahman beliau mengatak bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa ini mungkin dilatar belakangi karena warga yang tidak dapat tidak berdomisili di Desa Kilensari, karena masih banyak masyarakat yang tinggal di Desa Kilensari tapi alamat di KTP bukan Desa Kilensari. Pada hakekatnya bantuan langsung tunai dana desa bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sama dengan penelitian yang lakukan Raudatul Ratna Wati (2023), dimana di katakan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai dapat membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako.

#### 4.3.4 Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Faktor pendukung membantu memperkuat, mendukung atau meningkatkan pelaksanaan suatu tujuan dengan memberikan dukungan yang positif berikut beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari Panarukan antara lain :

1. Ketersediaan sumber daya seperti halnya sumberdaya manusia yang mendukung, keuangan, dan infrastruktur yang memadai. Hal ini di dukung dengan pernyataan dari Bapak saningwar beliau mengutarakan bahwa adanya ketersediaan sumber daya dapat membantu pelaksanaan program BLT-DD.
2. Terjalannya kerjasama yang baik antara pihak yang berkesinambungan. Hal ini di dukung dengan pernyataan dari Bapak Saningwar beliau mengutarakan bahwa dalam pelaksanaan program menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dapat mempermudah proses pelaksanaan.
3. Terdapat transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Bapak Rahman juga mendukung dengan pernyataan diatas, bahwasanya keterbukaan dalam pelaksanaan program dapat memper mudah proses pelaksanaan BLT-DD

Diatas telah menjelaskan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. jika terdapat faktor pendukung pasti

terdapat juga faktor penghambat, berikut beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari diantaranya sebagai berikut :

1. Minimnya pengetahuan masyarakat dapat menghambat proses pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, hal ini diperkuat dengan pernyataan dari bapak saningwar beliau mengutarakan bahwasanya minimnya pengetahuan dan informasi yang dapat di dapat oleh masyarakat dapat menghambat proses pelaksanaan BLT-DD
2. Terdapat masyarakat yang tidak memiliki NIK dapat mempersulit proses pelaksanaan program, hal ini didukung dengan pernyataan dari Ibu Lia selaku staff desa, beliau mengutarakan bahwasanya masyarakat yang tidak memiliki KTP akan dibuatkan surat domisili dari desa untuk membuat KTP, dengan ini dapat memperhambat proses pelaksanaan.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana analisis pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensasi Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdapat beberapa proses dan tahapan yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

#### **1. Persiapan**

Tahap awal kegiatan Bantuan Langsung Tunai adalah persiapan yang melibatkan koordinasi dari berbagai pihak, seperti kepala seksi kesejahteraan, urusan umum, perencanaan, dan keuangan. Dalam Proses persiapan ini membentuk rapat musyawarah desa (MUSDES) untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran.

#### **2. Penetapan Penerima KPM**

Tahap kedua adalah menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam Penyiapan data penerima manfaat melibatkan pendataan, verifikasi, validasi.. Seluruh proses penyiapan data dilakukan secara cermat untuk memastikan keakuratan data penerima.

#### **3. Mekanisme Penyaluran**

Tahap ketiga adalah mekanisme penyaluran BLT-DD, dalam tahap ini melibatkan penetapan perencanaan penggunaan Dana Desa, persetujuan alokasi anggaran, identifikasi penerima manfaat, pemberitahuan, pencairan tunai, dan pemantauan evaluasi.

#### **4. Monitoring dan Evaluasi**

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini memiliki manfaat yang baik. Dalam keterlibatan masyarakat dapat menimbulkan tingkat kecemburuan yang sangat tinggi. Takhanya sampai disitu terdapat beberapa masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mungkin merasa tertinggal karena merasa layak dan ingin mendapatkan

bantuan tersebut, meskipun sebenarnya sudah menerima bantuan lain. Tetapi masih ada juga masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan dikarenakan luput dari pendataan dan tidak memiliki KTP dan berbeda domisili dengan KTP.

Program ini lebih difokuskan pada masyarakat yang belum menerima bantuan lain dan benar-benar membutuhkan bantuan. Sebagai hasilnya, panitia pelaksanaan program lebih memprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat ialah dapat meningkatkan kesejahteraan penerima, meningkatkan akses layanan publik, dan membantu memenuhi kebutuhan pokok.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

1. Keterangan Sumber daya seperti halnya sumber daya manusia yang mendukung, keuangan, dan infrastruktur yang memadai
2. Terjalannya kerjasama yang baik antara pihak yang berkesinambungan.
3. Terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

b. Faktor Penghambat

1. Minimnya pengetahuan masyarakat
2. Terdapat masyarakat yang tidak memiliki KTP

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Mengadakan sosialisasi untuk masyarakat yang menerima agar mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan langsung tunai dan dapat mempermudah dalam pelaksanaan
2. Penyuluhan dan Bantuan Administrasi: Memberikan penyuluhan dan bantuan administrasi kepada masyarakat yang mungkin tidak memiliki KTP atau berbeda domisili dengan KTP agar tidak terlewat dari pendataan dan dapat menerima bantuan sesuai kebutuhan.

3. Evaluasi Rutin: Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program untuk memperbaiki kelemahan dan memastikan efektivitas program dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima dan mengurangi tingkat kecemburuan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat penerima.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoellah, Awan Y. & Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Abdurrahman, Nana Herdiana. 2018. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung, Pustaka Setia.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga..
- Budiman Rusli. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing: Bandung
- Edi Suharto, 2019. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung Alfabeta.
- Harahap, S. S. (2016). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan-Edisi 1-Cetakan 13*. Jakarta: Rajawali Pers
- Islamy, I. 2010 *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Jann, W., & Wegrich, K. 2007. Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. New York.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Kencana, Syafiie Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mohamad Mustari. 2015. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In F. Fischer, G. J. Miller, & M.S.Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. New York: CRC Press Taylor & Francis Group
- Sahya Anggara 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Jakarta Pustaka Setia. 2012

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung : CV. Alfabeta.

Suryawati 2004 *Teori Ekonomi Mikro* UPP AMP YKPN: Yogyakarta

Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. (2014). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media

William N. Dunn 2013 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press

Winarno Budi, 2008 *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta

### **Skripsi**

Putri Windarti 2022 Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Muar Jalai. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

### **Jurnal**

Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramdhani (2017) *Jurnal Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*

Ambok Pabgiuk (2018) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *Jurnal Fakultas Ekonomi*

Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati (2015) Kebijakan Publik Konsep Pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*

Hermawati, Istiana dkk. 2015. *Pengkajian konsep dan Indikator Kemiskinan*. Yogyakarta : B2P3KS

Itang 2015 *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Journal of the Faculty of Islamic Economics and Business.

Margaretha Larasati Prayoga, Muchtolifah Sisha Diyanti (2021) *Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Economi Education

Maun, C.E. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad

Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Political Science Journal*

Mthethwa, R.M., 2012. *Critical Dimensions for Policy Implementation*. Journal of Public Affairs,

Novilanda Ade Putra, Zaili Rusli, Febri Yuliani, Jurnal penelitian Tentang Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*

Solikatun, Supono, Yulia Masruroh, Ahmad Zuber (2014) Jurnal Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*

Suryawati, Indah 2014, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia, Bogor

Trisna Waty Eryani, Ela Yusrlanti (2022). Dampak Sosial Ekonomi Bagi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Muara Bdad Ulu Kecamatan Muara Budak Kabupaten Kutai Kertanegara Profinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Of Applied Sciences (FJAS)*

#### **Dokumen Lain :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo 2024

RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun (2021-2026)

Badan Pusat Statistik, Suevei Sosial Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2022

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020

#### **Undang-Undang :**

Peratura Mentri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menrti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Priorsitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Undang-undang RI nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

**Website**

*BKKBN Kilensari BERSERI*

*[https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan\\_langsung\\_tunaiTanggal](https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunaiTanggal)*

*[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Situbondo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo)*

### Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa Kilensari



Wawancara dengan Penanggung Jawab BLT-DD



Wawancara dengan Ibu Sumiyati



Wawancara Dengan Ibu Eta



Wawancara Dengan Ibu Tolak